

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi sebagai prasyarat pembangunan, yang relatif lebih kecil dapat menghambat daerah tertinggal untuk menuju konvergensi dengan daerah yang lebih maju. Belanja pemerintah merupakan salah satu ukuran yang memengaruhi perekonomian dan merupakan bentuk stimulus yang dilakukan pemerintah pada tahap awal perkembangan. Hal ini terkait bahwa belanja pemerintah mempunyai peranan sebagai instrumen fiskal melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pengalokasian belanja seharusnya lebih diutamakan pada fungsi-fungsi krusial dibandingkan hanya belanja rutin. Masalah yang terjadi adalah masyarakat yang mengharapkan anggaran untuk perbaikan fasilitas umum seperti jalan, irigasi, jaringan dan belanja yang termasuk dalam komponen belanja modal seharusnya lebih besar, kenyataannya dalam data Kemendagri anggaran untuk belanja pegawai dalam bentuk gaji pegawai dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih besar. Apabila belanja modal semakin rendah maka peluang pembangunan dan perbaikan fasilitas umum daerah akan semakin kecil.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan

lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Hal ini tidak lepas dari peran serta para perangkat/pegawai pemerintah daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang banyak berkaitan dengan birokrasi pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik (*public service*).

Struktur APBD merupakan salah satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu system anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Belanja Daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum Belanja Daerah dapat dikategorikan ke dalam pengeluaran rutin atau belanja langsung dan pengeluaran pembangunan atau belanja tidak langsung. Pengeluaran rutin merupakan belanja yang penggunaannya untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah, sedangkan pengeluaran pembangunan merupakan belanja yang penggunaannya tidak dinikmati langsung oleh masyarakat, yaitu pengeluaran berupa investasi untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah, belanja diklafikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Tidak Langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari, Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Tabel 1.1

**Total Belanja Daerah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2009 - 2013 (ribu rupiah)**

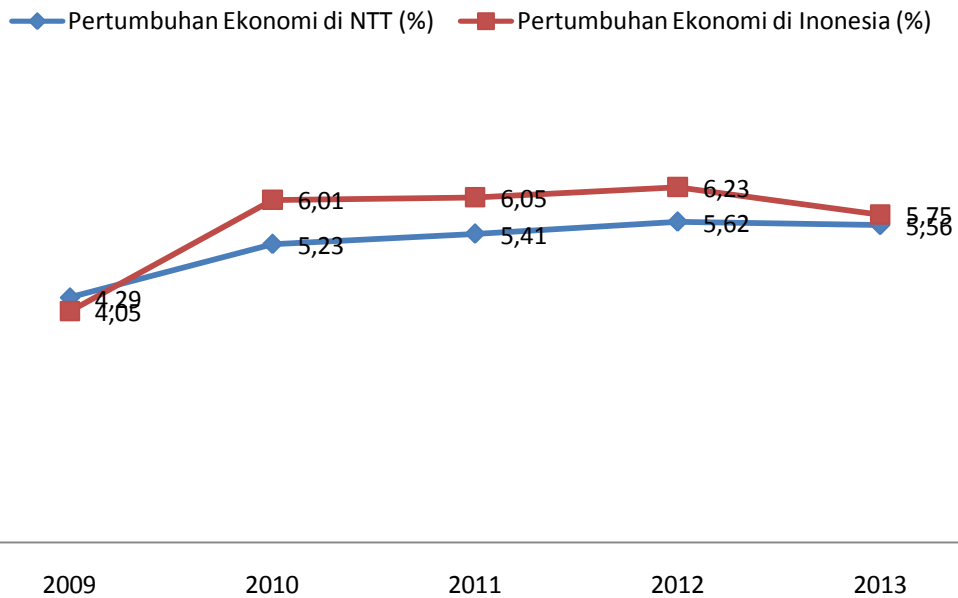
Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja Daerah
2009	4.137.771.531	3.606.230.463	7.717.031.834
2010	4.748.567.983	3.662.260.414	8.610.428.357
2011	5.299.289.824	4.455.256.933	10.154.810.757
2012	6.119.674.662	4.556.063.773	10.657.746.238
2013	7.137.095.800	5.444.572.481	12.602.665.254

Sumber: Biro Keuangan Provinsi NTT

Berdasarkan sumber data dari Badan Pusat Statistik, pengeluaran pemerintah dalam hal ini belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2009 hingga 2013 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan ini diikuti dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dihitung dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan berdasarkan harga konstan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengeluaran pemerintah dalam membiayai penyediaan akan barang publik. Berikut adalah gambar perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Persentase Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2009 – 2013



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, NTT

Pada grafik diatas menunjukkan presentase perbandingan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, dimana dari tahun 2009 sampai 2012 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan.

Mungkin hal ini disebabkan realisasi belanja modal pemerintah untuk infrastruktur sangatlah rendah.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Dimana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat tepat sasaran maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. Bila pertumbuhan ekonomi daerah meningkat maka tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga produktivitasnya semakain tinggi. Sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Semenjak penerapan desentralisasi fiskal pengeluaran pemerintah daerah semakin meningkat dan diikuti pertumbuhan ekonomi yang di fluktuatif. Apabila pendapatan daerah meningkat maka pengeluaran pemerintah juga semakin besar dan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi. Sehingga implikasi dari instrumen kebijakan fiskal dapat berpengaruh terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi yang output barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pengeluaran pemerintah adalah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan ekonomi biasanya diukur dengan banyaknya jumlah barang dan jasa yang dihasil disediakan atau diproduksi oleh pemerintah secara efisien, didistribusikan dengan biaya terjangkau dan dikonsumsi oleh masyarakat yang memadai.

Menurut *Musgrave* sebagaimana dikutip oleh Pota (2015) ada tiga fungsi ekonomi pemerintah secara tradisional yaitu Fungsi Alokatif untuk mengalokasikan

sumberdaya ekonomi, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi dan sumberdaya modal/kapital ke berbagai sektor produksi berserta komposisinya agar dapat menghasilkan barang dan jasa dalam pemenuhan kebutuhan publik. Fungsi distribusi untuk mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata baik secara individu, kelompok maupun daerah.

Fungsi Stabilisasi untuk mencapai stabilisasi makro ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Fungsi stabilitas makro ekonomi jangka pendek berkenaan dengan penggunaan kebijakan anggaran untuk mempertahankan tingkat kesempatan yang tinggi sehingga perekonomian terhindar dari masalah pengangguran, kebijakan anggaran dapat membantu sektor rill dalam menghasilkan barang dan jasa publik sehingga tercapai harga yang stabil dan terhindar dari masalah makro ekonomi yaitu inflasi.

Stabilisasi ekonomi ditunjukkan pula oleh fungsi anggaran dalam mempertahankan neraca pembayaran yang seimbang sehingga perekonomian terhindar dari masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran yang berkepanjangan. Sedangkan dalam jangka panjang diharapkan peran anggaran dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi diatas laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan inflasi dan laju pertumbuhan tingkakan pengangguran sehingga tersedia barang dan jasa publik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Di samping itu juga untuk mencapai tiga efisiensi ekonomi yaitu efisiensi alokatif, distributif dan stabilitatif. *Musgrave, Samuelson* dan *Nordhaus* dalam Pota (2015) menambahkan satu fungsi pemerintah yaitu yang dikemukakan oleh Musgrave

adalah fungsi pembentukan kerangka landasan hukum. Fungsi ini harus sejalan dengan perkembangan ekonomi, termasuk proses penyediaan input, proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah untuk kepentingan publik.

Teori makro *Wagner* dirumuskan dalam hukum tentang peningkatan pengeluaran pemerintah di mana dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah sebagai presentase terhadap GNP akan terus meningkat sesuai perkembangan ekonomi masyarakat dan industri modern (*Pota 2015*). *Mangkoesoebroto* dalam *Pota (2015)* mengemukakan bahwa apabila pertumbuhan dimaksudkan oleh *Wagner* itu secara relatif maka dalam perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat.

Wagner (*Pota, 2015*) mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut teori organik mengenai pemerintah (*Organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Selain itu teori makro pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh *Peacock dan Wisaman* (*Pota, 2015*) bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah.

Teori Mikro tentang perkembangan pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Berapa banyak barang publik yang dihasilkan oleh pemerintah tergantung interaksi permintaan dan penawaran. Peran pemerintah untuk menentukan skala prioritas barang dan jasa publik yang mana harus dihasilkan terlebih dahulu ketimbang yang lainnya beserta kelompok sasaran. Menurut Mangkoesobroto seperti yang dikutip Pota (2015) bahwa pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dalam pencapaian sumberdaya ekonomi ekonomi yang efisiensi.

Untuk mendukung Pelaksanaan Keuangan: Ada 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan Delegasi sebagai Tugas Pembantu, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah.

Dari uraian diatas maka judul yang diajukan penulis tentang penelitian ini adalah **“PENGARUH BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NTT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Perkembangan Total Alokasi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten/kota se-Provinsi NTT terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
- b. Bagaimana Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Perkembangan Total Alokasi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten/kota se-Provinsi NTT terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan praktis, penelitian ini memberi ruang kontribusi terhadap pemerintah daerah sebagai akses informasi yang akurat dalam pembuatan kebijakan, dalam memecah masalah ekonomi regional terlebih khusus bidang fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Kegunaan Akademisi, sebagai referensi bagi penelitian- penelitian lebih lanjut yang mendalam.